

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Subkontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” yang menggunakan metode penelitian bersifat normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat keabsahan subkontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan akibat hukum subkontrak terhadap para pihak. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai bahan bacaan kepada para pembaca atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 7 (tujuh) syarat yang bersifat kumulatif mengenai keabsahan subkontrak dalam pengadaan barang jasa pemerintah yaitu syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 BW dan 3 (tiga) syarat tambahan: (1) bukan pekerjaan utama; (2) terdapat klausul subkontrak dalam kontrak induk; dan (3) persetujuan PPK. Berdasarkan penerapan asas *privity of contract*, hubungan hukum yang lahir dari subkontrak berpengaruh juga terhadap tanggung gugatnya yaitu antara penyedia barang/jasa dengan subkontraktor. Saran dari penelitian ini adalah perlu perubahan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menambahkan syarat keabsahan subkontrak dan perlunya kebijakan hukum mengenai adanya daftar khusus subkontrak yang gagal melaksanakan pekerjaan yang dialihkan.

Kata Kunci : subkontrak, pengadaan barang/jasa pemerintah, keabsahan, tanggung gugat.

ABSTRACT

This thesis entitled "Subcontracting in Procurement of Goods / Services," which uses normative research methods. The purpose of this study was to determine the validity of the terms of subcontracting in the procurement of government goods / services and the legal consequences subcontract to the parties. While the benefits of this research is to be used as reading material to readers on the issues discussed in this study. The approach used in this study is statute approach and conceptual approach. The conclusion from this research is that there are 7 (seven) cumulative requirements regarding the validity of subcontracting in the procurement of government services. The conditions listed in Article 1320 BW and three (3) additional conditions: (1) the subcontracting is not the main job; (2) there is a subcontracting clause in the main contract; and (3) approval of the PPK. Based on the application of the principle of privity of contract, a legal relationship that is born of the subcontract also affect the liability between providers of goods / services with subcontractors. Suggestions from this study is the urge to change the regulation of Procurement of Government Goods / Services by adding the validity of subcontracting requirements and it is necessary to make legal policies regarding their special list for the subcontractor which fails to carry out the work.

Keywords: subcontracting, procurement of goods / services of government, validity, liability.